



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman
<http://www.fisipundip.ac.id>

KINERJA BUPATI BATANG TAHUN 2012

Oleh :
(Anggara Febrianto¹, Drs. Suwanto Adhi, SU², Drs. Susilo Utomo, Msi³)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Yoyok Riyo Sudibyo terpilih sebagai Bupati Batang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Batang tahun 2011. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Batang, Yoyok mengusung visi “Birokrasi Bersih dan Ekonomi Bangkit”. Di tahun 2012, program kerja daerah difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2012, ditemukan kekurangan-kekurangan dalam kepemimpinan Bupati Batang. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya konflik dengan masyarakat terkait proyek pembangunan. Ditambah adanya konflik dengan DPRD terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan di daerah dan legitimasi Bupati Batang sebagai kepala daerah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Bupati Batang dalam menyelenggarakan pemerintahan di tahun 2012

Upaya untuk mengetahui kinerja bupati menggunakan teori dari Dwiyanto tentang beberapa fenomena yang menjadi dasar penilaian kinerja, antara lain : produktivitas, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, responsibilitas. Penelitian dengan menggunakan tipe deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Obyek penelitian adalah kinerja Bupati batang di tahun 2012.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja Bupati dalam satu tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang dinilai cukup baik. Hal ini

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro Angkatan 2009

² Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro

³ Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro

dikarenakan selama kurun waktu satu tahun Bupati berupaya maksimal untuk mulai merintis upaya-upaya guna mewujudkan visi yang diusungnya. Beberapa sektor pengelolaan daerah pun mengalami peningkatan pencapaian realisasi yang signifikan, meskipun masih banyak ditemukan kekurangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpinnya.

Kata kunci: Kinerja Bupati, Penilaian Kinerja, Realisasi

ABSTRACT

In 2011, Yoyok Riyo Sudibyo was being elected as Batang's Regent. He tagged "Clean Bureaucracy and Growing Economy" vision in running his government for 5 years ahead. He started the 2012 by focusin on enhancing the quality of public service, infrastructure and the government accountability.

Contrary, we find out there is lack of good governance in Batang's Regency during 2012. Some reasons are residents are being not pleased with the Government plan in developing the regency; also the government never reaches an agreement with the legislative for its own budget and masterplan. Vividly, those complicated events are becoming an obstacle for the government. Moreover the legitimation of the regent is also being questioned by his lack of ability in maintaining its own government.

The purpose of the research is to understand the performance of Batang's Regent while running its Government during 2012.

The performance evaluation indicators are taken from the Dwiyanto's theorem, those are: productivity, accountability, transparency, reponsivity, and responsibility. The research is conducting by using the descriptive basis while the supporting data are analyzed qualitatively. The object's of the research is the Batang's Regent performance for the year 2012.

The research concludes that the Regent's performance during a year is qualitatively reasonable for being marked as good. The purpose is, the optimum effort that already being given by the regent to reach its own goal—the government's vision. Some government supporting departments also reach a significant performance improvement during his leadership. However, we still find some governance failure during a period.

Keywords : Regent Performance, Performance Assessment, Realization

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lahirnya UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari berbagai peraturan perundangan yang lebih dulu terbit, yaitu terhadap UU no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pilkada langsung merupakan salah satu instrumen yang menjadi bukti penyempurnaan demokrasi di daerah, sesuai yang diatur dalam UU no.32 tahun 2004 pasal 24 ayat 5. Dengan metode pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung kemungkinan kolusi antar anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk menggolkan calon kepala daerah tertentu yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat dapat dieliminasi.

Melihat pelaksanaan pilkada langsung yang diselenggarakan di Indonesia sekarang ini, terlihat sekali bahwa pilkada langsung sangat sarat diwarnai oleh fenomena kompetisi dan kompromi kepentingan antar kelompok-kelompok tertentu, bukan berdasarkan kesadaran arti pentingnya penyelenggaraan pilkada untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jalannya pemerintahan daerah pasca pilkada akan sangat terkait dengan proses di fase sebelumnya yaitu pada saat pelaksanaan pilkada. Apabila dalam proses pelaksanaan pilkada marak diwarnai oleh praktek money politik dan persengkongkolan politik serta bisnis maka akan muncul praktek pemerintahan informal yang akhirnya menyebabkan penyelenggaraan pemerintah daerah akan lebih didominasi oleh kekuatan politik, ekonomi dan sosial di luar struktur formal pemerintahan

Di sisi lain, dalam tataran empiris, pola pemerintahan pasca pilkada juga sangat dipengaruhi oleh relasi antara kepala daerah dengan DPRD. Relasi antara kepala daerah - DPRD bisa bervariasi antara satu dengan yang lain. Hal ini tergantung dari pada siapa yang menjadi kepala daerah, dari partai mana dan seberapa besar mereka memperoleh dukungan dari rakyat (popular vote) maupun dari kekuatan-kekuatan yang ada di DPRD. apabila kepala daerah terpilih dari salah satu partai besar atau tidak berasal dari partai mayoritas yang ada di DPRD. Dalam kondisi yang seperti ini relasi kepala daerah – DPRD akan cenderung lebih dinamis. Hal tersebut akan memunculkan pola ‘checks and balances’, yakni adanya posisi yang relatif sama kuat antara kepala daerah dan DPRD

Pada penyelenggaraan pilkada di bulan November 2011 terpilihlah sosok Yoyok sebagai Bupati Batang dengan visi “Birokrasi Bersih dan Ekonomi Bangkit”. Berbagai usaha yang telah dilakukan dalam kurun satu tahun pemerintahannya telah memberikan impact positif bagi Kabupaten Batang, seperti naiknya pendapatan daerah dan terbentuknya UPKP2. Namun ironisnya, apa yang di cita-citakan melalui pembentukan UPKP2 belum sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Alih-alih mendengarkan aspirasi masyarakat, Bupati Yoyok dinilai lebih mendahulukan dan mementingkan kepentingan klien-klien yang berjasa memenangkannya pada saat pilkada dan terlibat konflik dengan masyarakat

Selain itu hubungan antara pemerintahan Bupati Yoyok dengan DPRD Kabupaten Batang juga tidak terlalu harmonis. Hal ini disebabkan DPRD Kabupaten Batang

dikuasai oleh kekuatan-kekuatan politik yang berseberangan dengan Bupati. Terlihat dari komposisi anggota dewan di DPRD Kabupaten Batang, dari total 45 anggota dewan, hanya 11 anggota yang berasal dari kekuatan politik yang sama dengan Bupati Yoyok semasa pilkada. Kondisi ini menyebabkan Bupati Yoyok tidak bisa begitu saja menetapkan kebijakan yang bisa mendukung terwujudnya visi yang dia usung.

B. TEORI

Yang dimaksud dengan kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan persyaratan dan tata cara yang diajukan baik oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki jumlah kursi tertentu di DPRD, dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.⁴

Salah satu karakteristik pemimpin pemerintahan di era otonomi daerah, khususnya kepala daerah, adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi pemerintahan maupun dalam masyarakat, serta memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, saran dan mungkin juga pengawasan yang datang dari masyarakat, serta tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat.

Penilaian kinerja kepala daerah merupakan suatu proses untuk menilai hasil kerja kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui instrumen penilaian kinerja. Kinerja kepala daerah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan tata pemerintahan daerah, baik dan buruknya kinerja kepala daerah berpengaruh langsung terhadap maju dan tidaknya daerah yang dipimpin. Untuk itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala daerah harus memperhatikan prosedur dan aturan yang sudah ada dalam undang-undang pemerintahan dan ketentuan lainnya.

Menurut Dwiyanto,⁵ ada beberapa fenomena yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja, yaitu : (1) produktivitas, (2) akuntabilitas, (3) transparansi, (4) responsivitas, (5) responsibilitas.

C. METODE

Penelitian ini ditujukan untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja bupati, kemudian dianalisis dan dicarikan sebuah rekomendasi. Oleh karena keperluan tersebut maka dipilihlah sebuah metode kualitatif dengan tipe deksriptif yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap fenomena yang menjadi dasar penilaian kinerja Bupati Batang dalam menyelenggarakan pemerintahan di tahun 2012. Penelitian ini menggunakan

⁴ Akmal, Imelda.2005. *Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung (menurut Undang-Undang no.32 tahun 2004)*. Yogyakarta:Media Pressindo, halaman 15

⁵Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.Yogyakarta : PSKK UGM, halaman 48

teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada narasumber yang mengetahui permasalahan. Selain itu juga menggunakan studi pustaka

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Produktivitas

Dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Batang tahun 2012 guna menyesuaikan program kerja yang direncanakan dengan visi yang diusung Bupati Batang. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2012.

Dalam aspek kinerja keuangan daerah, selama tahun 2012 berhasil ditingkatkan pendapatan daerah sebesar 13,89%. Selanjutnya dalam aspek pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, seperti perbaikan jalan raya, pembangunan jalan desa dan pembangunan pelabuhan diperoleh pencapaian yang memuaskan, rata-rata realisasinya mencapai 77%.⁶

Ditemukan juga beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2012. Terdapat dana sebesar 125 milyar rupiah yang tidak terserap sempurna. Beberapa proyek SKPD juga belum terselesaikan. Kedua hal tersebut disebabkan banyaknya realisasi program diakhir tahun. Selain itu ada juga penganggaran yang tidak rasional di beberapa SKPD, terutama dalam pengadaan mobil dinas.

2. Akuntabilitas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Yoyok, kegiatan pertanggungjawaban bupati dilakukan dalam dua bentuk kegiatan, Pembahasan LKPJ dengan DPRD dan pembacaan hasil pembangunan yang ditujukan langsung bagi masyarakat.

Kegiatan pembahasan LKPJ bersama DPRD juga dilaksanakan dalam pemerintahan tahun 2012. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk sidang paripurna DPRD untuk menyetujui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batang pada 1 Juli 2013. Namun sangat disayangkan karena sempat terjadi konflik antara bupati dengan beberapa anggota dewan yang menyebabkan pemboikotan pada sidang pertama pembahasan LKPJ.

Kegiatan pembacaan hasil pembangunan di Kabupaten Batang selama tahun 2012 yang diperuntukkan bagi masyarakat diadakan dalam dua tahap. Di tahap pertama pembacaan hasil pembangunan Kabupaten Batang tahun 2012 dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Batang. Selanjutnya di tahap kedua, kegiatan pembacaan hasil pembangunan daerah yang ditujukan bagi masyarakat umum se-Kabupaten Batang dilaksanakan pada 13 Februari 2013 di Pendopo Kabupaten Batang.

3. Transparansi

Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, di tahun 2012 Kabupaten melaksanakan kerjasama dengan TII, IWC, BPK dan KPK sebagai

⁶ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2012

upaya awal untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Dibentuk juga UPKP2 sebagai unsur pemenuhan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Dalam rekrutmen dan promosi aparatur, Bupati memberikan ruang lebih bagi Baperjakat untuk mengatur proses rekrutmen dan promosi pegawai pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan tahun 2012 ditemukan fenomena “balas budi” yang menyebabkan adanya penunjukkan pejabat dan pemegang proyek secara sepihak.

4. Responsivitas

Dalam upaya mengenali kebutuhan dan keluhan dari masyarakat, Bupati Yoyok melaksanakan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menjarang aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut adalah Bupati Batang Mendengar dan Menjawab (BBM-an) yang dilaksanakan sebulan sekali pada malam jumat kliwon di rumah dinas bupati. Musrenbang, merupakan dasar penetapan program kerja selama setahun, dilaksanakan secara bertingkat mulai dari desa sampai tingkat daerah. Pembentukan UPKP2 juga dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan saran dan keluhan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

5. Responsibilitas

Bupati Batang menunjukkan responsibilitasnya dalam mewujudkan pelayanan yang prima dengan memberikan diklat dan bintek bagi pegawai-pegawai yang bergerak pada bidang-bidang yang harus banyak terjun langsung ke masyarakat. Selain itu disosialisasikan juga rencana proyek pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah. Ditambah lagi dengan ditetapkannya kebijakan reward and punishment bagi individu maupun SKPD. Dilaksanakan juga peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik juga dilakukan hingga instansi di tingkat desa.

B. PEMBAHASAN

Dari temuan penelitian tersebut diketahui bahwa selama tahun 2012 ada tiga aspek utama yang menjadi fokus Bupati Batang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tiga aspek tersebut adalah (i) pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur; (ii) peningkatan kualitas pelayanan publik; (iii) menciptakan pemerintah yang transparan.

Di sektor pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, banyak dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang diyakini akan sangat menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan dan pasar. Hal ini didasarkan pada visi daerah untuk membangkitkan kembali sektor perekonomian yang selama ini dinilai banyak mengalami penurunan disebabkan lambatnya pembangunan sarana pendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Sesuai juga dengan hakekat pelaksanaan otonomi daerah, bahwa tiap-tiap daerah harus mampu mengelola rumah tangganya secara mandiri. Sehingga dalam hal ini kemajuan dalam bidang ekonomi akan sangat vital perannya. Apabila mampu memajukan perekonomian di daerah, akan sangat memungkinkan terwujud daerah

otonom yang berhasil. Kondisi seperti inilah yang berupaya diwujudkan oleh Bupati Batang.

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi prioritas Bupati Batang dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2012. Berbagai macam program kerja yang bisa mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik mulai diselenggarakan. Kegiatan public hearing (BBM-an dan musrenbang), pembentukan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta pelatihan dan pembinaan bagi pegawai dilaksanakan pada tahun 2012. Bukannya tanpa alasan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas Bupati Batang. Hal ini didasari bahwa pada hakekatnya masyarakat merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala macam produk kebijakan dan program kerja pemerintah akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya prinsip dasar bahwa pemerintah berfungsi untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Sehingga untuk menjaga agar setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah selalu didasarkan pada kepentingan masyarakat maka harus dibuka ruang yang luas bagi publik untuk ikut serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan yang terbuka di Kabupaten Batang juga mulai dirintis dengan menjalankan konsep keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan program, penganggaran, realisasi hingga proses evaluasi. Hal ini didasari akan pentingnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi kepala daerah itu sendiri. Apabila tingkat kepercayaan atau akseptabilitas masyarakat tinggi, maka dengan otomatis tingkat legitimasi seorang kepala daerah juga akan ikut meningkat. Ditambah lagi pada pemerintahan sebelumnya, banyak sekali ditemukan fakta bahwa mayoritas pejabat daerah tersandung kasus korupsi. Maka dari itu konsep keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat mutlak diperlukan untuk mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Upaya ini juga bisa menjadi langkah awal bagi Bupati Batang untuk menciptakan birokrasi yang bersih, sesuai visi dan misi yang diusung.

Itu semua merupakan fokus kerja Bupati Batang di tahun 2012 guna mewujudkan visi daerah “Birokrasi Bersih dan Ekonomi Bangkit”. Tujuan dari pelaksanaan upaya-upaya Bupati tersebut memang belum sepenuhnya terwujud. Banyak celah yang ditemukan dalam realisasi program kerja yang ada. Bupati harus segera memperbaiki kekurangan dan celah-celah yang ada. Penetapan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan program kerja tepat waktu mutlak menjadi aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan selanjutnya. Bupati Batang juga dituntut untuk meningkatkan kemampuannya sebagai kepala daerah terutama dalam melakukan lobi politik guna menetapkan kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun selanjutnya. Bukannya tanpa alasan hal tersebut harus menjadi fokus Bupati, tidak cukup hanya dengan kemampuan perencanaan yang matang, pengawasan yang terstruktur dan keakuratan realisasi, kemampuan negosiasi seorang kepala daerah diyakini akan lebih

menyempurnakan kapabilitas dari kepala daerah itu sendiri. Sehingga kebijakan dan program kerja yang ditetapkan akan dapat berjalan dengan lebih optimal dan dinamis serta minim terjadinya konflik. Karena sangat mungkin dengan mengusung visi “birokrasi bersih dan ekonomi bangkit” penyelenggaraan pemerintahan di Bawah Bupati Yoyok akan mendapatkan banyak tantangan dan ganjalan dari pihak oposisi yang memiliki prinsip dan visi berbeda.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam setahun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang, kinerja Bupati dinilai cukup baik. Hal ini dikarenakan selama kurun waktu setahun, Bupati berupaya maksimal untuk mulai merintis upaya-upaya guna mewujudkan visi yang diusungnya. Dari segi produktivitas, beberapa sektor pembangunan dan pengelolaan keuangan mengalami peningkatan pencapaian realisasi yang signifikan, meskipun masih banyak ditemukan kekurangan di dalam penganggaran dan pelaksanaannya. Dari segi penyelenggaraan pelayanan publik, berhasil ditingkatkan upaya pemerintah daerah dalam mengenali kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam pelaksanaan BBM-an dan pembentukan UPKP2 yang difungsikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, mulai dirintis melalui pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait transparansi.

B. SARAN

- 1) Efisiensi, baik dalam hal perencanaan anggaran dan penggunaan anggaran harus lebih diperhatikan dalam penyusunan APBD di tahun selanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi penganggaran yang tidak rasional dan tumpang tindih anggaran, serta anggaran pada tiap-tiap program kerja dapat terserap dengan sempurna. Mengenai program kerja yang direncanakan, harus tetap fokus pada upaya mewujudkan visi daerah. Ditambah lagi harus menjalin hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk menghindari konflik kepentingan individu atau kelompok dalam menetapkan kebijakan.
- 2) Pembacaan hasil pembangunan dan rincian penggunaan anggaran yang langsung ditujukan kepada masyarakat harus dipertahankan agar tingkat legitimasi bupati tetap tinggi. Bila perlu hasil pembangunan dan rincian penggunaan dipublikasikan melalui web pemerintah daerah, media massa maupun media sosial. Agar seluruh elemen masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait hal tersebut.
- 3) Perlu segera ditetapkan standarisasi prosedur seleksi dalam proses rekrutmen, untuk menghindari adanya tindakan nepotisme. Ditambah lagi perlu dibuka pusat layanan informasi yang akurat terkait pembangunan PLTU. Hal ini dikarenakan selama setahun pemerintahan Yoyok, banyak terjadi konflik terkait pembangunan tersebut.
- 4) Untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang lebih akurat dan detail, kegiatan BBM-an perlu dilakukan di kecamatan yang berbeda tiap

pelaksanaannya. Hal ini juga memfasilitasi masyarakat yang berdomisili di kecamatan-kecamatan yang lokasinya jauh dari pusat kota, seperti Kecamatan Gringsing, Bawang dan Reban.

- 5) Perlu ditingkatkan kegiatan diklat dan bintek bagi pegawai di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Karena banyak sekali ditemukan pelayanan yang kurang prima di tingkat tersebut yang disebabkan pemahaman teknis yang kurang dari pegawainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akmal, Imelda. 2005. *Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung (Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004)*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi kependudukan dan Kebijakan UGM

Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed). 2004. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2012